

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adi Suryadi, 2006, *Rekonstruksi Civil Society Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*, Pustakan LP3S Indonesia, Jakarta.

Abu Daud Busroh, 2005, *Ilmu Negara*, dikutip dari Nimatul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, cetakan pertama, (Yogyakarta: UII Press,).

A. Ridwan Halim, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*; Ghalia Indonesia, Jakarta.

Aminuddin Ilmar, 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Cetakan Kesatu, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Budi Juliardi, 2015, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, cetakan kedua, (Jakarta: Rajawali pers).

Bagirmanan, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, cetakan pertama, FH UI Press, Yogyakarta.

Indroharto, 1995, *Perbuatan Pemerintah menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*. Bogor Jakarta: LPP HAN.

Jamhari dan Jahroni, Jajang, 2004, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Jimly asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.

-----, 2005, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, cetakan kedua (Jakarta: Konstitusi Press).

Frans Magnis Suseno, 1997, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, Gramedia, Jakarta.

Fajlurrahman Jurdi, 2016, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang.

Miriam budiardjo, 1986, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).

Miriam Budiardjo, 1977, *Masalah – Masalah Kenengaraan* ,(Jakarta: Gramedia).



-----, 2013, *Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, Jakarta, Pustaka Ibnu Sidah), cet.3.

-----, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*; Prenada Media Group; Jakarta.

-----, 2014, *Ilmu negara*, Edisi 1. Cetakan keenam, Rajawali Press, Jakarta.

- , 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, cetakan pertama, (Yogyakarta: UII Press).
- Phillipus M hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *"Penelitian Hukum"*, kencana-PrenadaMedia Group, Jakarta.
- Pasha Mustafa Kamal, 2000, *Pendidikan kewarganegaraan*, (Yogyakarta:Citra Karsa mandiri).
- R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Soerjono Soekanto*, 2012, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, Cet. Ketiga, UI Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *"Penelitian Hukum Normatif"*, Cetakan ke-8.
- Soepomo dalam A.Mukhtie Fadjar, 2004, *Tipe Negara Hukum*, Bayu Media dan In- TRANS, Malang.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyat nya*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sirajuddin dan Winardi, 2015, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Malang: Setara Press).
- Tim ICCE UIN, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, (Jakarta ICCE UIN, 2000).
- Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi, 2014, *Pengantar Hukum Indoensia Dari Tradisi Ke Konstitusi*, CV Pustaka Setia, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang rgnasasi Kemasyarakatan, Sinar Grafika, Jakarta.

ING

lharta, *Kajian Kefilsafatan tantang Negara Hukum*, dalam jurnal Hukum enteria edisi 3-Tahun II, November 2004, Jakarta:PSHK.

Darmatu, E. R., & Wada, I.A. 2017. Wewenang Pemerintah dalam Pembubaran

Organisasi Masyarakat. e-Journal Lentera Hukum, 4 (3),

Manggala Ismanto. *Penguatan Identitas lokal dan Penolakan Vigilantisme Atas Nama Agama* (Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik, Universitas Brawijaya, 2017) Vol.30, No.3

Periksa website melalui <http://www.kemendagri.go.id/news/2017/10/30/ini-penjelasan-kemendagri-tentang-jumlah-ormas-di-indonesia> (di akses pada tanggal 13 Juli 2021 Pukul 19.05 WITA)

Periksa artikel mengenai kontroversi perppu, dalam website melalui <https://www.google.co.id/amp/amp.kompas.com/nasional/read/2017/07/13/07414181/kontroversi-isi-perppu-ormas-bukti-keberanian-atau-jalan-pintas> (dia akses pada tanggal 01 oktober 2021 jam 13.11 WITA)

Periksa artikel sidang perppu ormas website melalui <http://nasional.kompas.com/read/2017/10/02/17194001/sidang-perppu-ormas-ahli-hukum-nilai-pancasila-akan-kehilangan-ruh-jika> (diakses pada tanggal 1 Oktober 2021 Jam 13.52 WITA)

Periksa website melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-skb-menteri-dalam-peraturan-perundang-undangan-lt5c401dcce8628>, akses 27 juni 2022.

Usman Hamid, Amnesty International Indonesia Beberkan 4 Syarat Pembubaran Ormas, diakses melalui website: <https://www.hukumonline.com/berita/a/amnesty-international-indonesia-beberkan-4-syarat-pembubaran-ormas-lt6245ccd6c78d7/>, Sabtu, 22 Juni 2024.

Veronica Agnes Sianipar, eddy Mulyono dan Rosita Indrayati, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan* , e-Journal Lentera Hukum,Fakultas hukum Uneveristas Jember, April 2014,I (1)





Optimized using
trial version
www.balesio.com



Optimized using
trial version
www.balesio.com



Optimized using
trial version
www.balesio.com